

ANALISIS *E-GOVERNANCE* DALAM PROGRAM SAMIN (SARANA INFORMASI INVESTASI) OLEH DPMPTSP (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) BOJONEGORO

Ihsan Dwi Hartanto

Program studi Administrasi Publik,
Fakultasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitasi 17 Agustus 1945 Surabaya,
ihsanndwi1234@gmail.com

Supri Hartono

Program studi Administrasi Publik,
Fakultasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitasi 17 Agustus 1945 Surabaya,
suprihartono@untag-sby.ac.id

M Kendry Widiyanto

Program studi Administrasi Publik,
Fakultasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitasi 17 Agustus 1945 Surabaya,
kenronggo@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of e-Governance through the SAMIN (Investment Information Facility) Program implemented by the Bojonegoro Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP). The SAMIN program is one of the digital innovations designed to increase transparency, efficiency, and ease in delivering investment information to the public and investors electronically. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results showed that the implementation of e-Governance in the SAMIN Program has reflected the principles of digital governance, namely transparency, participation, and accountability. Nevertheless, there are still some obstacles in terms of data integration between agencies, increasing the capacity of human resources, and uneven utilization of information technology. This research recommends increasing human resource training, improving digital infrastructure, and strengthening cross-sector collaboration to support the optimization of the SAMIN Program as a strategic tool in attracting regional investment.

Keywords: *E-Governance, SAMIN, DPMPTSP, Bojonegoro, Investment, Digital Public Services*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Governance melalui Program SAMIN (Sarana Informasi Investasi) yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten

Bojonegoro. Program SAMIN merupakan salah satu inovasi digital yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan dalam penyampaian informasi investasi kepada masyarakat dan investor secara elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Governance dalam Program SAMIN telah mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan digital, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam hal integrasi data antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan SDM, perbaikan infrastruktur digital, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung optimalisasi Program SAMIN sebagai sarana strategis dalam menarik investasi daerah.

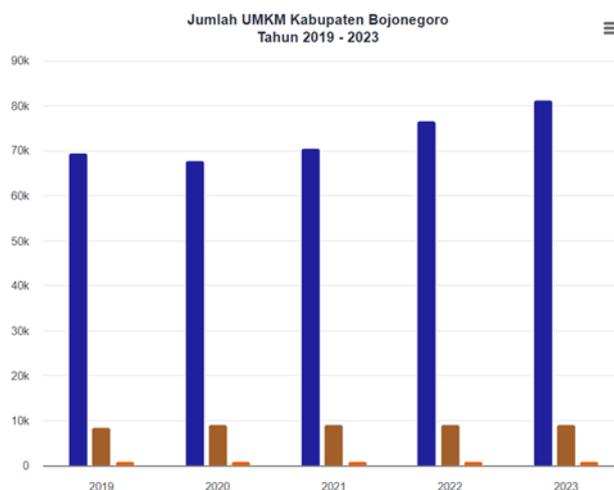
Kata Kunci: *E-Governance, SAMIN, DPMPTSP, Bojonegoro, Investasi, Pelayanan Publik Digital*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab atas pemberian pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik harus dilihat dari sejauh mana pelayanan yang diberikan tersebut bisa secara merata dapat diakses oleh masyarakat, efisien, keterbukaan, dan akuntabel (Apriyansa et al., 2025). Mengingat perkembangan zaman yang begitu pesat, dan tantangan globalisasi yang menuntut untuk kita terus beradaptasi dengan perkembangan tersebut, pelayanan publik diuntut untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih modern dan menyesuaikan semua perubahan terhadap perkembangan teknologi. Perubahan tersebut bukan hanya terikat pada perubahan prosedur saja, tetapi menyangkut adaptasi sistem pelayanan secara menyeluruh, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Digitalisasi di pemerintahan yang biasa disebut *E-governance* bukan hal baru, sudah banyak negara yang sudah berhasil mengambil manfaatnya dalam cara kerja birokrasi pasca era new public management ini, dengan bantuan teknologo digital ini memudahkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai instansi yang khusus bertugas untuk memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat pada dasarnya dapat dikatakan dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintah daerah untuk memudahkan yang di harapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, hal ini juga menjawab dan menunjukkan konsiten dan komitmen pemerintah Bojonegoro dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan usaha. Melalui website Samin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berupa menyediakan pelayanan layanan berbasis digital untuk memerlukan akses informasi terkait peta investasi dan potensi di setiap daerah di kabupaten

Bojonegoro bagi calon Investor maupun masyarakat yang mempunyai usaha, *E-governance* dalam Samin bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dan melaporkan usaha, seperti kegiatan pelaporan kegiatan penanaman modal LKPM, serta mendukung pengawasan yang lebih sistematis dan transparan. Program ini mencerminkan prinsip-prinsip utama E-governance seperti efisiensi dalam layanan publik. Dengan adanya platform ini, program interaksi antara pemerintah investor dan pelaku usaha menjadi lebih mudah, cepat dan terbuka menciptakan sistem ekonomi investasi yang lebih kondusif dan mudah. Contoh kota Bandung yang sudah membuat aplikasi GAMPIL. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah saat ini fokus pada pengembangan sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu contohnya adalah DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu) di Kota dan Kabupaten Bandung yang telah mengimplementasikan aplikasi berbasis online untuk memudahkan proses perizinan. Pemerintah Kota Bandung meluncurkan aplikasi bernama GAMPIL, yang memungkinkan pelaku usaha kecil mengurus perizinan secara online tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Aplikasi ini terdiri dari tiga bagian: untuk warga, kecamatan setempat, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Pelaku usaha dapat mendaftar melalui aplikasi online atau dengan bantuan petugas di BPPT atau kecamatan. (Adolph, 2016).



Gambar 1.1 Grafik pertumbuhan jumlah UMKM di kabupaten Bojonegoro

Sumber: <https://data.Bojonegoro.go.id/>

Data investasi atau penanaman modal di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan perkembangan yang dinamis dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat fluktuasi, upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bojonegoro dalam menarik investor terus dilakukan melalui berbagai kebijakan dan fasilitas yang mendukung. Dengan komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi, diharapkan investasi di Bojonegoro dapat terus tumbuh dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. Meskipun kalo di lihat dari table di bawah ini pada tahun 2024 mengalami penurunan di karenakan ada berbagai faktor.

Menurut Weber, birokrasi adalah bentuk organisasi yang paling efisien dan rasional untuk mengelola institusi besar, baik itu pemerintahan, perusahaan, atau organisasi lainnya. Weber melihat birokrasi sebagai sistem yang didasarkan pada aturan, hierarki, dan prosedur yang jelas. Weber percaya bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi yang paling efisien karena mengurangi ketidakpastian dan memastikan konsistensi dalam operasi. Namun, ia juga menyadari bahwa birokrasi bisa menjadi terlalu kaku dan impersonal, yang dapat menyebabkan alienasi dan kurangnya fleksibilitas.

Menurut Teori birokrasi Marxis berakar dari kritik Karl Marx dan Friedrich Engels terhadap negara dan birokrasi dalam sistem kapitalis. Marx memandang birokrasi bukan sebagai instrumen netral yang melayani kepentingan publik, tetapi sebagai alat dominasi kelas yang digunakan borjuasi kelas pemilik modal untuk mempertahankan kekuasaan dan mengeksploitasi proletariat kelas pekerja.

Menurut Sutan Takdir Alisjahbana juga menyentuh aspek birokrasi dalam konteks pembangunan bangsa, beliau menekankan pentingnya rasionalitas, efisiensi, dan modernisasi dalam sistem administrasi negara. Dalam visinya tentang “Manusia Indonesia Baru”. Birokrasi diharapkan menjadi instrument yang profesional dan berorientasi pada kemajuan, melepaskan diri dari praktik-praktek tradisional yang dianggap menghambat. Sebagai seorang intelektual yang terpengaruh oleh pemikiran modern barat, Sutan Takdir alisjahbana menekankan pentingnya rasionalitas dan efisiensi dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk birokrasi. Beliau melihat bahwa untuk mencapai kemajuan, Indonesia memerlukan sistem administrasi negara yang terorganisasi secara logis, berdasarkan aturan yang jelas, dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Sutan Takdir alisjahbana juga membahas tentang modernisasi Birokrasi, dalam konteks birokrasi, modernisasi berarti meninggalkan praktek-praktek tradisional yang kurang efisien dan menggantinya dengan sistem yang lebih profesional, terstruktur, dan responsive terhadap perkembangan zaman, beliau menginginkan birokrasi yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kinerja.

B. LANDASAN TEORI

Konsep Birokrasi

Menurut David Osborne dan Ted Gaebler teori birokrasi yang berjudul “*Entrepreneurial Government*” atau “Mewirusahaakan Birokrasi” Teori ini kemukakan dalam buku mereka yang sangat berpengaruh, “*Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*” (1992) Teori ini muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap model birokrasi yang dianggap kaku, tidak efisien, dan kurang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat, Osborne dan Gaebler Menawarkan paradigma baru dalam sektor publik dengan mengadopsi prinsip-prinsip kewirausahaan. Inti dari teori Birokrasi Entrepreneurial adalah mentransformasikan semangat wirausahawan ke dalam sektor publik, ini bukan berarti birokrasi harus berbisnis untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mengadopsi pola pikir yang inovatif, berorientasi pada hasil, dan responsif terhadap pelanggan (warga negara).

Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang setidaknya sejak abad 19, telah menjadi actor sedemikian penting dalam Sejarah umat manusia, Organisasi modern merupakan *conditi sine que non* bagi tumbuh dan berkembangnya organisasi dan birokrasi dewasa ini. Organisasi dan birokrasi memang berbeda sisi satu adalah organisasi dan sisi lain adalah birokrasi yang menjalankan organisasi. Organisasi dan birokrasi dapat dibedakan, namun tidak dapat di pisahkan, organisasi memiliki tujuan dan birokrasi menjalankan agar tujuan organisasi dapat di tercapai. Birokrasi melayani semua stakeholder baik pelayanan kepada Masyarakat atau pelayanan publik, pelayanan kepada lembaga/instansi lain pelayanan kepada pimpinan organisasi, maupun pelayanan kepada pegawai di organisasi atau instansi itu sendiri. Sebagai upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat, maka yang harus di lakukan adalah dengan cara mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan, standar pelayanan publik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem birokrasi, menurut Weber birokrasi sebagai sistem administrasi yang di jalani oleh pejabat profesional berdasarkan aturan formal, hierarki yang jelas dan pembagian kerja yang sistematis, Weber melihat birokrasi sebagai produk dari rasionalisasi- proses di mana tindakan sosial semakin didasarkan pada kalkulasi efisiensi, bukan tradisi atau emosi.

Peningkatan Efisiensi Pelayanan E-governance memungkinkan integrasi data dan informasi dari berbagai instansi terkait dalam satu platform digital. Hal ini mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah birokrasi yang berbelit, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan berbagai urusan administratif dengan lebih cepat, menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, E-Government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas, transparansi efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik, melalui E-governance pemerintah berupaya mempermudah interaksi antara instansi pemerintah dengan warga negara. (M. Sufriyadi, 2014)

Berikut adalah beberapa konsep utama dalam E-governance :

1. Pelayanan publik yang terintegrasi G2C: Government to Citizen salah satu fokus utama E-governance adalah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Ini untuk pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga pendidikan. Dalam digitalisasi masyarakat dapat mengakses layanan secara cepat tidak harus datang ke kantor pemerintah.
2. Interaksi Pemerintah dan Dunia Usaha G2B: Government to Business E-governance juga bertujuan untuk mempermudah proses bisnis dan investasi dengan mengintegrasikan layanan perizinan, pajak, regulasi, dan administrasi bisnis. Melalui portal digital, pelaku usaha dapat mengajukan izin, melaporkan pajak, dan mengikuti tender pemerintah dengan lebih mudah dan transparan.
3. Kolaborasi Antar Instansi Pemerintahan G2G: Government to Government E-governance memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk berbagi data dan informasi secara real-time. Sistem ini mendukung pengambilan

keputusan yang lebih baik melalui koordinasi dan integrasi data, sehingga menghindari duplikasi data dan mengurangi birokrasi.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas bahwa, E-government dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, dan pelayanan publik. Weslatt menekankan bahwa e-government adalah bentuk nyata dari integrasi antara teori dan praktik, di mana konsep-konsep seperti tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipasi publik, dan inovasi teknologi diwujudkan dalam sistem dan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dengan demikian, E-government bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teori-teori pemerintahan dan administrasi publik diimplementasikan secara praktis untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan institusi pemerintahan. Pendekatan ini menuntut kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa E-government dapat mencapai tujuannya secara efektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro adalah lembaga yang bertanggung jawab atas urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di tingkat kabupaten. DPMPTSP Bojonegoro memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal. Lembaga ini juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi seperti sistem perizinan elektronik (SIMANIZ).

Samin adalah Program investasi yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui DPMPTSP, Samin sendiri di buat untuk menjawab tantangan di era digitalisasi dan percepatan ekonomi, kebutuhan akan informasi investasi yang akurat, terpadu, dan mudah di akses menjadi sangat penting bagi para investor, baik lokal maupun asing, Samin Merupakan suatu sarana informasi berbasis web Geographic Information System (GIS) interaktif bagi calon investor yang ingin menanam modal di Bojonegor, Platform di rancang untuk memberikan kemudahan akses informasi seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan investor, baik dari dalam maupun dari luar daerah melalui Samin, berbagi potensi dan peluang investasi di Bojonegoro di Promosikan Secara digital, sehingga dapat menjangkau calon investor secara luas dan efisien, Samin juga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai undang-undang. Tujuan utama Samin adalah menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah kabupaten Bojonegoro dengan para investor, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi investasi, dengan menyajikan data potensi sektrop-sektro strategis prosedur perizinan, kemudahan berusaha, di Bojonegoro memiliki bayang potensi yang belum optimal seperti di sektor Pariwisata, Pertanian, dan Usaha UMKM melalui Samin potensi tersebut dapat di promosikan secara lebih masif, menarik minat investor untuk mengembangkan usaha di sektor yang belum banyak terjamah. Dengan segala fitur dan manfaat yang ditawarkan, Samin diharapkan tidak hanya menjadi portal informasi tetapi juga wadah interaktif yang memfasilitasi diskusi antara Investor, Pemerintah, Masyarakat. Jika di kelola secara berkelanjutan

platform ini dapat jadi terobosan tersendiri bagi bertubuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro dan bermanfaat bagi Masyarakat.

Untuk meningkatkan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha serta mendukung prinsip transparansi dan aksesibilitas informasi investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro secara resmi meluncurkan Website Samin (Sarana Informasi Investasi) pada 13 Juni 2024, bertempat di Eastern Hotel Bojonegoro. Peluncuran website ini bertepatan dengan kegiatan sosialisasi pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses perizinan yang berbasis risiko, yang diatur dalam kerangka regulasi perizinan nasional. Website SAMIN merupakan salah satu inovasi strategis DPMPTSP Bojonegoro dalam menyajikan data dan informasi yang komprehensif mengenai potensi investasi daerah

Salah satu fitur unggulan dalam website SAMIN adalah penyediaan peta potensi wilayah berbasis geo-spasial. Melalui fitur ini, calon investor dapat secara langsung mengakses informasi visual mengenai zona-zona potensial di Kabupaten Bojonegoro, seperti kawasan industri, lahan pertanian unggulan, lokasi strategis untuk perdagangan, serta titik-titik yang memiliki sumber daya alam. Peta ini disusun dengan sistem informasi geografis (GIS) yang interaktif, sehingga pengguna dapat melakukan pencarian dan penelusuran berdasarkan kategori, wilayah, maupun potensi sektor tertentu. Data sektoral seperti industri, pertanian, pariwisata, dan UMKM,

Penyediaan informasi ini bertujuan untuk meminimalisasi hambatan birokrasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pelayanan publik di Bojonegoro. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, pemerintah daerah berupaya membangun iklim investasi yang terbuka, efisien, dan pro-bisnis, sekaligus mewujudkan prinsip *E-Governance* dalam pelayanan publik, khususnya pada aspek *Government to Business (G2B)*.

1. Pendekatan G2C (Government to Citizen)

Pendekatan G2C merujuk pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat umum sebagai warga negara. Dalam konteks program SAMIN, hubungan ini tergambar melalui, Kemudahan akses layanan digital Masyarakat Bojonegoro kini dapat mengakses informasi terkait perizinan dan non-perizinan secara mudah, transparan, dan cepat melalui website SAMIN, tanpa harus datang langsung ke kantor DPMPTSP. Melalui implementasi program Sistem Aplikasi Manunggal Izin dan Non-Perizinan (SAMIN), masyarakat Kabupaten Bojonegoro kini menikmati kemudahan luar biasa dalam mengakses layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan perizinan dan non-perizinan. Sebelumnya, masyarakat harus datang langsung ke kantor DPMPTSP untuk mengurus berbagai keperluan administratif, seperti pengajuan izin usaha, izin mendirikan bangunan, atau permohonan informasi tertentu. Hal ini tentu memerlukan waktu, tenaga, bahkan biaya transportasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok.

Dengan hadirnya website SAMIN, seluruh proses tersebut dapat dilakukan secara online, dari mana saja dan kapan saja, selama terkoneksi dengan internet. Masyarakat cukup membuka laman resmi SAMIN melalui perangkat seperti ponsel

pintar, komputer, atau laptop, kemudian memilih jenis layanan yang diinginkan. Di dalam sistem ini telah tersedia formulir digital, panduan pengisian, serta informasi lengkap terkait syarat dan prosedur perizinan. Selain itu, transparansi menjadi aspek utama dalam layanan ini. Masyarakat dapat mengetahui status permohonan secara real-time, apakah sedang diproses, ditolak karena kekurangan dokumen, atau telah selesai dan bisa diunduh. Ini sangat membantu mengurangi praktik birokrasi yang lambat dan menghindari pungutan liar (pungli), karena semua proses terekam dalam sistem. Tidak hanya itu, website SAMIN juga menyediakan fitur layanan pengaduan, permohonan konsultasi, serta pengingat otomatis melalui notifikasi email atau sistem, yang memudahkan masyarakat untuk memantau perkembangan dokumen mereka tanpa perlu berulang kali menghubungi kantor terkait. Dengan sistem ini, DPMPTSP Bojonegoro telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan digital, sejalan dengan prinsip e-Government yang menekankan pada efisiensi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu mempercepat perubahan birokrasi yang lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan warga. Website SAMIN memiliki manfaat bagi masyarakat yaitu sosialisasi peningkatan literasi pelayanan publik digital.

Dengan adanya layanan online, warga dilibatkan untuk lebih melek teknologi serta memahami proses birokrasi yang selama ini dianggap rumit. Hadirnya website SAMIN (Sistem Aplikasi Manunggal Izin dan Non-Perizinan) yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro, tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan, tetapi juga secara langsung mendorong peningkatan literasi digital masyarakat, terutama dalam konteks pelayanan publik. Sebagian besar masyarakat khususnya di daerah pedesaan atau pelosok masih menghadapi kendala besar dalam mengakses layanan birokrasi, baik karena kurangnya informasi, ketidaktahuan tentang prosedur, atau minimnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan dokumen administrasi lainnya. Proses birokrasi juga kerap dianggap rumit, lambat, dan penuh hambatan teknis.

Sejak layanan ini tersedia secara online, masyarakat didorong untuk terlibat langsung dalam proses administrasi digital. Mereka mulai terbiasa membuka situs web resmi, mengisi formulir digital, mengunggah dokumen dalam format PDF atau JPEG, serta memantau status permohonan mereka secara mandiri. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tidak hanya itu, melalui sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh petugas DPMPTSP atau pemerintah desa, warga juga diberi pemahaman tentang struktur, alur, dan pentingnya setiap tahapan dalam proses birokrasi. Ini menjadikan masyarakat lebih paham bahwa pelayanan publik modern menuntut kolaborasi antara warga sebagai pemohon dan pemerintah sebagai penyedia layanan.

Peningkatan literasi digital ini berdampak luas, seperti:

1. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
2. Menurunnya angka kesalahan administratif karena masyarakat sudah lebih paham alur proses.

3. Munculnya budaya baru dalam masyarakat untuk mengurus izin secara mandiri dan transparan.
4. Terbukanya peluang bagi generasi muda dan pelaku UMKM untuk ikut serta dalam ekosistem digital pelayanan publik.

Dengan kata lain, program SAMIN tidak hanya berfungsi sebagai alat layanan, tetapi juga sebagai media edukasi digital, yang memberdayakan warga Bojonegoro untuk menjadi masyarakat yang lebih melek digital, mandiri secara administratif, dan aktif dalam pembangunan lokal. Dengan demikian, dalam perspektif Clay G. Wescott, program SAMIN oleh DPMPTSP Bojonegoro dapat dipandang sebagai bagian dari model G2C, karena turut memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara melalui penyediaan informasi publik, peningkatan transparansi, dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Meskipun fokus utamanya adalah investasi, SAMIN secara luas menyentuh kepentingan warga, yang menjadi inti dari prinsip *e-Governance* berbasis warga (*citizen-centric governance*).

2. Pendekatan G2B (Government to Business)

Pendekatan G2B menggambarkan interaksi antara pemerintah dan pelaku usaha (investor, UMKM, dan korporasi). Dalam program SAMIN.

Salah satu keunggulan utama dari platform SAMIN adalah kemudahan dalam proses pendaftaran izin usaha yang lebih cepat dan transparan. Investor maupun pelaku usaha lokal kini dapat mengajukan berbagai perizinan, seperti Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Nomor Induk Berusaha (NIB), secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Melalui sistem digital yang disediakan dalam platform SAMIN, proses perizinan menjadi jauh lebih efisien dan mudah diakses. Pemohon tidak lagi harus datang langsung ke kantor, karena seluruh dokumen dapat diunggah secara daring, status pengajuan dapat dipantau secara real time, dan notifikasi akan dikirim secara otomatis ke pemohon. Inovasi ini tidak hanya mempersingkat waktu dan menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan proses perizinan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan pemerintah pun semakin tumbuh, sejalan dengan prinsip pelayanan publik berbasis *E-Government*. "Fasilitas ini menjadi wujud nyata dari penerapan *E-Government* berbasis Government to Business (G2B), di mana pemerintah daerah berperan aktif dalam menciptakan layanan publik yang cepat, terbuka, dan mendukung iklim investasi yang ramah terhadap dunia usaha.

Melalui platform SAMIN, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya DPMPTSP, berperan aktif dalam memfasilitasi kemitraan dan mendorong investasi. Data dan informasi yang ditampilkan secara real-time melalui SAMIN dimanfaatkan untuk menunjukkan potensi unggulan daerah, seperti sektor industri, pertanian, dan sumber daya alam. Penyajian data yang akurat dan terkini ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon investor, karena mereka dapat melihat langsung peluang kemitraan maupun lokasi strategis untuk pengembangan usaha. Dengan demikian, SAMIN tidak hanya menjadi alat informasi, tetapi juga instrumen strategis pemerintah daerah dalam memperluas jejaring investasi dan membangun kolaborasi antara pelaku usaha lokal dan investor nasional maupun internasional.

3. Pendekatan G2G (Government to Government)

G2G mencerminkan kolaborasi antarinstansi pemerintah untuk mendukung keberhasilan program. Dalam konteks program SAMIN. Meskipun Website SAMIN dirancang sebagai platform informasi investasi yang mendukung integrasi data lintas sektor, hingga saat ini DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro belum menjalin kerja sama resmi dengan instansi teknis lain, baik di tingkat daerah seperti Diskominfo, Bappeda, dan Dinas Lingkungan Hidup, maupun dengan instansi vertikal seperti ATR/BPN. Idealnya, integrasi data antarinstansi ini sangat penting untuk memastikan sinkronisasi informasi seperti perizinan, tata ruang, dan potensi wilayah.

Namun, dalam praktiknya, ketiadaan mekanisme integrasi ini membuat seluruh proses pembaruan dan validasi data dalam Website SAMIN masih bergantung pada sumber internal DPMPTSP atau komunikasi konvensional antar OPD. Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem layanan digital yang benar-benar akurat, real-time, dan lintas sektor. Meski begitu, desain SAMIN telah menunjukkan kesiapan untuk menjadi platform terpadu di masa mendatang, apabila koordinasi dan komitmen antarinstansi dapat terbangun secara formal.

Dalam pelaksanaannya, implementasi program Website SAMIN diarahkan untuk dapat berjalan secara kolaboratif dan terstruktur, melalui upaya membangun koordinasi kebijakan digital yang didukung oleh kerangka regulasi daerah, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas sektor, serta pelaksanaan evaluasi berkala. Meskipun koordinasi lintas instansi masih bersifat terbatas, DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro mulai menyiapkan fondasi kebijakan yang memungkinkan terbentuknya tata kelola digital yang terintegrasi.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan penyajian data yang sudah diuraikan di bab sebelumnya maka dalam analisis program SAMIN di Kabupaten Bojonegoro penulis menggunakan teori analisis E-government dari Clay G. Wescott dengan pendekatan Government to Citizen G2C, Government to Business (G2B) Government to Government (G2G).

Melalui pendekatan G2C, layanan digital SAMIN memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi perizinan dan non-perizinan secara cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang inklusif dan efisien. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor DPMPTSP, cukup dengan mengakses layanan melalui website resmi, mereka dapat mengajukan permohonan, melacak status, dan memberikan masukan terhadap pelayanan. Namun, partisipasi masyarakat dalam penggunaan sistem ini masih terbatas karena belum meratanya literasi digital di berbagai kalangan.

Dalam pendekatan G2B, implementasi SAMIN telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memperoleh izin usaha dan informasi investasi. Prosedur yang lebih cepat dan transparan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dunia usaha melalui digitalisasi birokrasi. Meski begitu, beberapa pelaku usaha masih mengalami kendala teknis,

seperti pemahaman sistem atau keterbatasan perangkat, sehingga dibutuhkan peningkatan sosialisasi dan pendampingan.

Rekomendasi

1. **Peningkatan Literasi Digital Masyarakat (G2C)**
Melaksanakan pelatihan rutin dan sosialisasi tatap muka maupun daring untuk memperkenalkan penggunaan layanan digital SAMIN kepada masyarakat umum, khususnya di wilayah pedesaan.
Bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan organisasi masyarakat untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya layanan digital dalam pelayanan publik.
2. **Penguatan Dukungan terhadap Pelaku Usaha (G2B)**
Menyediakan layanan pendampingan atau *helpdesk* khusus bagi pelaku usaha (terutama UMKM) untuk membantu proses perizinan secara online melalui SAMIN.
Menyediakan template dan panduan teknis yang mudah dipahami oleh pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran dan pelacakan izin.
3. **Integrasi Data dan Koordinasi Antar Instansi (G2G)**
Mendorong integrasi sistem informasi SAMIN dengan OPD lain seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan kecamatan agar proses perizinan lebih efisien dan tidak tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. R. T. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83–92. <https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10143>
- Adolph, R. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title*. 9(September), 1–23.
- Darwis, D., Haning, M. T., & Indar, N. I. N. (2020). Restrukturisasi Organisasi dan Kualitas Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 365–380. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4352>
- Irawan, B. (2015). E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. *Jurnal Paradigma*, 4(3), 202. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/419/379>
- Irawan, B., Nizar, M., Akbar, P., & Khanz, A. H. (2020). Inovasi Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *Matra Pembaruan*, 4(2), 135–145. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.135-145>
- M.Sufriyadi. (2014). Analisis Penerapan E- Government Dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan. *Motivation and Emotion*, 30(3), 243–250.
- Rahayu, N. S., & Lubis, A. W. (2022). Menganalisis Efektifitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Pelayanan Publik pada Bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 144–152.

<https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1278>

- Wimmer, M. A. (2002). A European perspective towards online one-stop government: The eGOV project. *Electronic Commerce Research and Applications*, 1(1), 92–103. [https://doi.org/10.1016/S1567-4223\(02\)00008-X](https://doi.org/10.1016/S1567-4223(02)00008-X)
- Abubakar, R. R. T. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83–92. <https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10143>
- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 9(September), 1–23.
- Apriyansa, A., Tebai, D., & Ick, J. F. (2025). *ANALISIS PENERAPAN APLIKASI OSS SEBAGAI UPAYA DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI DPMPTSP KABUPATEN SORONG*.
- Darwis, D., Haning, M. T., & Indar, N. I. N. (2020). Restrukturisasi Organisasi dan Kualitas Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 365–380. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4352>
- Irawan, B. (2015). E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. *Jurnal Paradigma*, 4(3), 202.
- Irawan, B., Nizar, M., Akbar, P., & Khanz, A. H. (2020). Inovasi Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *Matra Pembaruan*, 4(2), 135–145. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.135-145>
- M.Sufriyadi. (2014). Analisis Penerapan E- Government Dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan. *Motivation and Emotion*, 30(3), 243–250.